

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH TAHUN 2011-2030 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Mevita Inestia**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI KEBIJAKAN RTRW TAHUN 2011-2030 KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
MEVITA INESTIA**

Berdasarkan hasil kajian Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030, luas seluruh ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 yang telah di Perdakan pada tahun 2011 seluas 2.185,59 Ha atau sekitar 11,08% dari total luas Kota Bandar Lampung dengan ruang terbuka hijau publik seluas 1.895,89 Ha atau sekitar 9,61% dari luas Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2016, hasil kajian Laporan Rencana Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung mengalami pengurangan dari luas Ruang Terbuka Hijau publik yaitu menjadi 533,86 Ha atau sekitar 2,70% dari total luas Kota Bandar Lampung. Sedangkan dengan luas wilayah Kota Bandar Lampung yang luasnya 19.722 Ha memerlukan luas ruang terbuka hijau publik seluas 3.944 Ha atau 20% dari luas kota, sehingga Kota Bandar Lampung masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau yang sangat luas yaitu 3.410,14 Ha atau 17,3% . Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mencari data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030 belum berhasil. Yang dinilai dari 6 indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Pada indikator efektifitas yang dinilai dari waktu, sasaran dan tujuan dengan hasil evaluasi yaitu kurang efektif karena pemerintah kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, indikator efisiensi hasil evaluasi cukup efektif, karena

dari masing-masing lembaga terkait telah menyiapkan usaha atau strategi dalam memenuhi kebijakan RTRW tahun 2011-2030, indikator kecukupan dengan hasil evaluasi kebijakan RTRW tahun 2011-2030 di Kota Bandar Lampung cukup baik walaupun ada masalah yang belum dapat terselesaikan dengan ,indikator pemerataan dinilai belum merata karena pada kenyataannya berdasarkan RTRW 2011-2030 RTH dialokasi oleh pemkot seluas 11,08% yang mana idealnya bahwa didalam UUD NO 26 tahun 2007 RTH diwajibkan 30%. 20% untuk publik dan 10% untuk privat, indikator responsivitas dinilai bahwa responsivitas pemerintah terhadap masyarakat belum baik karena pembentukan RTRW yang cenderung terburu-buru dan melupakan aspek ekologis dan keselamatan warga Kota Bandar Lampung, dan indikator ketepatan cukup tepat karena akan diadakan program pengelolaan ruang terbuka hijau walaupun tetap harus ada pengawasan dari beberapa bukit di Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

## ABSTRACT

### POLICY EVALUATION OF RTRW 2011-2030 CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

MEVITA INESTIA

Based on the results of the Fact study and Analysis of the RTRW Evaluation of Bandar Lampung City in 2011-2030, the total area of green open space in Bandar Lampung City in 2009 which was approved by the Regional Regulation in 2011 was 2,185.59 Ha or about 11.08% of the total area of the City. Bandar Lampung with public green open space covering an area of 1,895.89 hectares or about 9.61% of the area of Bandar Lampung City. In 2016, the results of the study on the Evaluation Plan for the Regional Spatial Plan (RTRW) of Bandar Lampung City 2011-2030 Public Green Open Spaces in Bandar Lampung City experienced a reduction from the area of public green open spaces, which was 533.86 hectares or around 2.70% of the total area of Bandar Lampung City. Meanwhile, the area of Bandar Lampung City which is 19,722 hectares requires an area of 3,944 hectares of public green open space or 20% of the city area, so that Bandar Lampung City still lacks a very wide green open space of 3,410.14 hectares or 17.3%. The purpose of this study was to evaluate the RTRW policy of Bandar Lampung City 2011-2030. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach to find data. The results of this study indicate that the RTRW policy of Bandar Lampung City 2011-2030 has not been successful. It is assessed from 6 indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. In terms of effectiveness indicators assessed from time, goals and objectives with evaluation results that are less effective because

the government is less than optimal in implementing the policy, the efficiency indicators of the evaluation results are quite effective, because each relevant institution has prepared a business or strategy in fulfilling the RTRW policy for the year. 2011-2030, the adequacy indicator with the results of the 2011-2030 RTRW policy evaluation in Bandar Lampung City is quite good even though there are problems that cannot be resolved with the distribution indicator is considered uneven because in fact based on the 2011-2030 RTRW the RTH is allocated by the city government of 11, 08% which ideally is that in UUD NO 26 of 2007 green open space is required to be 30%. 20% for the public and 10% for the private, the responsiveness indicator is considered that the government's responsiveness to the community is not good because the formation of the RTRW tends to be in a hurry and forgets the ecological and safety aspects of the citizens of Bandar Lampung City, and the accuracy indicator is quite precise because a space management program will be held green open although there must still supervision from several hills in Bandar Lampung City.

**Keywords: Evaluation, Regional Spatial Planning Policy (RTRW)**

**EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH TAHUN 2011-2030 DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Mevita Inestia**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2011-2030**

Nama : **Mevita Inestia**

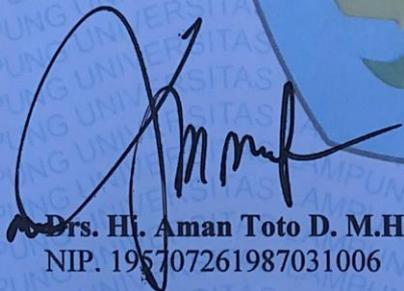
No. Pokok Mahasiswa : **1716021037**

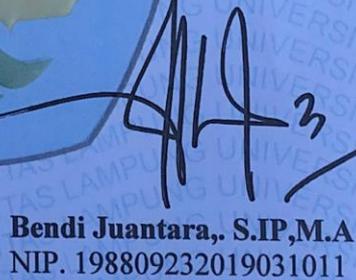
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

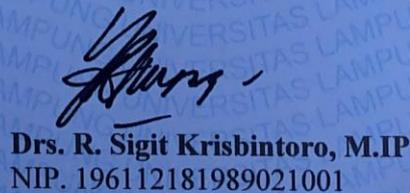


1. **Komisi Pembimbing**

  
**Drs. H. Aman Toto D. M.H**  
NIP. 195707261987031006

  
**Bendi Juantara, S.IP,M.A**  
NIP. 198809232019031011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

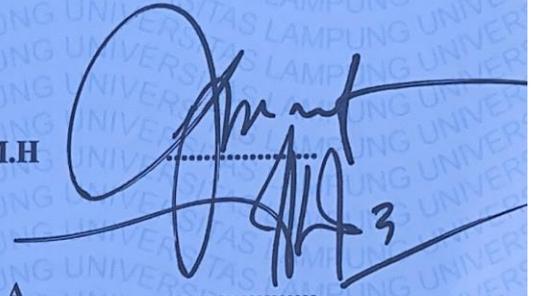
  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

**Drs. Hi. Aman Toto D. M.H**



Sekretaris

**: Bendi Juantara, S.IP,M.A**

Penguji

**: Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juli 2022

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mevita Inestia anak kedua (dua) dari 4 bersaudara. Dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 19 Mei 1999. Putri dari pasangan Bapak Melvin YS dan Ibu Anita Turisia. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-kanak (TK) Ar-Raudah, Bandar Lampung tahun 2004. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Di SD Negeri 2 Rawa Laut Teladan pada tahun 2011.

Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMPN 9 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas, penulis selesaikan di SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SMNPTN. Penulis pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sirna Galih, Kecamatan Cukuk Balak, Kabupaten Tanggamus dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada tahun 2020.

## MOTTO

“ Kita menjadi bijak bukan oleh ingatan masa lalu kita, tetapi dengan tanggungjawab untuk masa depan kita ” (**George Bernard Shaw**)

“Jika kita menyerah pada kegagalan sekarang, maka kita tidak akan berhasil nantinya.” (**Mario Teguh**)

“ Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu, orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang terburuk memberimu pelajaran dan orang terbaik memberimu kenangan.  
(**Mevita Inestia**)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

Dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa:

Kedua orang tuaku, Bapak Melvin YS dan Ibu Anita Turisia yang senantiasa sabar dalam membimbing setiap langkahku, mendidikku dengan penuh cinta, mendoakan serta melimpahkan segenap kasih sayang dan materi yang tiada terhingga.

Kakak Elvita Anestia dan Adikku Viyobas Rinanda dan Muhammad Alfad, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi dan semangat.

Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung.**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 Di Kota Bandar Lampung". Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi hingga akhir dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D.M.H Selaku Pembimbing Pertama, Terimakasih telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.

5. Bapak Bendi Juantara. S.IP.M.A selaku dosen Pembimbing Kedua. Terimakasih telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
6. Bapak Arizka Warganegara. p.Hd, selaku dosen Pembimbing Akademik Peneliti
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan.
8. Seluruh informan yang telah bersedia menjadi informan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayah Melvin YS, terima kasih telah menjadi ayah yang sangat membanggakan untuk anak-anaknya, dan bekerja keras untuk menjadikan anak-anaknya sukses. Ibu Anita Turisia, terima kasih telah menjadi ibu yang sangat kuat,sabar dan senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi serta selalu mengajarkan hal-hal baik untuk anak-anaknya. Semoga kelak penulis akan terus membanggakan kalian.  
Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan Ibu tercinta.
10. Kakakku Elvita Anestia dan Adikku Viyobas Rinanda dan Muhammad Alfad yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam memaknai kehidupan.
11. Keluarga besar saya tante, om, sepupu, dan ponakan. Terima kasih sudah memberikan do'a, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.

12. Teman dari Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang sudah memberikan banyak momen indah selama kuliah.
13. Rahmania Tisandi, Dinda Tamarani, Humaira Anisya, Dedemas Febriyanti, Restuana Puari, Satria Erlangga, Ridho Makarim terimakasih telah menjadi tempat terbaik dalam keadaan susah maupun senang. Terima kasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan saya selama ini. Semoga semua urusan dan semua impiannya dapat terwujud dan dimudahkan selalu dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga.
14. Teman-teman SMA saya Nurika, Ade, Davina, Aulia, Emira terima kasih telah menjadi teman yang baik semoga kita dapat selalu menjalin silaturahmi dengan baik.
15. Teman-teman SMP saya Metri, Vindri, Dinda, Nana, Laras, Carisa, Cairika, terima kasih telah menjadi teman yang baik semoga kita dapat selalu menjalin silaturahmi dengan baik
16. Teman seperjuangan sekaligus teman berbagi kesulitan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi Fauli, Bella dan lainnya terimakasih telah menjadi teman yang baik.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung,

Mevita Inestia

## DAFTAR ISI

halaman

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>

### I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11

### II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Evaluasi.....	13
2.1.1 Jenis-jenis Evaluasi.....	15
2.1.2 Tujuan Evaluasi.....	16
2.1.3 Fungsi Evaluasi.....	16
2.2.4 Tahap-tahap Evaluasi.....	17
2.2. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan.....	18
2.2.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	19
2.2.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan.....	20
2.2.3 Jenis Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	21
2.2.4 Dimensi Evaluasi Kebijakan.....	22
2.3. Tinjauan tentang Perencanaan.....	30
2.4. Tinjauan tentang Ruang.....	31
2.4.1 Proses penataan ruang.....	32
2.5. Tinjauan tentang Tata Ruang.....	33
2.6. Tinjauan tentang Wilayah.....	35
2.7. Tinjauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.....	36
2.7.1 Tujuan Tata Ruang Wilayah.....	37
2.8. Kerangka Pikir.....	38

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Tipe Penelitian.....	42
3.2 Fokus Penelitian.....	43
3.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.4 Jenis Data.....	44
3.5 Informan.....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	48
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	49
3.9 Teknik Analisis Data.....	50

### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.....	52
4.2 Gambaran Umum BAPPEDA.....	54
4.3 Gambaran Umum LSM Walhi.....	60
4.4. Gambaran Umum DISPERKIM.....	62

### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian.....	65
5.2 Pembahasan.....	79

### **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	86

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1. Total Ruang Terbuka Hijau 2020.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	8
3. Kriteria Evaluasi menurut Dunn.....	19
4 .Data Informan.....	46
5. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung.....	54
6. Ruang Terbuka Hijau 2011-2030.....	67
7. Strategi Pemerintah Dalam RTRW 2011-2030.....	72

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.....	4
2. Diagram Perubahan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung.....	6
3. Bagan Kerangka Pikir.....	41
4. Struktur Organisasi BAPPEDA.....	56
5. Lahan RTH di Kota Bandar Lampung.....	76
6. Bukit di Bandar Lampung.....	83

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Kota merupakan suatu lingkungan binaan yang selalu berubah dan berkembang sebagai wadah lingkungan fisik yang menampung segala kegiatan fungsional dan sosial masyarakat, maka sebuah perkotaan harus mengandung unsur-unsur masyarakatnya. Secara ideal bisa dikatakan bahwa suatu perkotaan adalah lingkungan binaan manusia akan ruang tempat hidup, mencari penghidupan, dan berbudaya. Sehingga kebutuhan lahan sebagai ruang dalam proses pembangunan terus bertambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( Mugi Taufik ,2011 )

Pesatnya pertumbuhan pembangunan dan perekonomian merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu ciri dari negara berkembang. Pembangunan yang dilakukan di mana – mana oleh Pemerintah sampai saat ini masih saja terus direalisasikan, seperti pembangunan infrastruktur lainnya, bukan hanya melakukan perubahan dalam segi pembangunan ekonomi, melainkan juga melakukan perubahan – perubahan sosial instusionalnya.

Pertumbuhan kota memicu adanya para pengembang untuk membuat ide baru dengan mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya dipakai untuk daerah resapan menjadi fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, serta sarana dan prasarana transportasi, akan tetapi para pengembang tersebut tidak memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Para pengembang fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, serta sarana dan prasarana

transportasi hanya memikirkan dari segi ekonominya saja, tidak memikirkan dari segi lingkungan hidupnya. Namun di sisi lain peningkatan jumlah penduduk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan juga menjadi salah satu faktor munculnya alih fungsi lahan tersebut. (Denny, 2012 : 4)

Perubahan tata guna lahan merupakan konsekuensi pembangunan dan membutuhkan rumusan kebijakan, perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan. Hampir setiap aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan dan karena jumlah aktivitas manusia bertambah dengan cepat, maka lahan menjadi sumberdaya langka. Keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan memberikan keuntungan dan kerugian, baik ditinjau dari pengertian ekonomis, maupun terhadap perubahan lingkungan. Membuat keputusan tentang penggunaan lahan merupakan aktivitas politik dan sangat dipengaruhi keadaan sosial dan ekonomi (Sitorus, 2004 : 7).

Undang-undang No. 26 tahun 2007 mengamanatkan perlunya suatu perencanaan pembangunan yang berbasis penatagunaan ruang yang mengharuskan setiap daerah menyusun konsep ketataruangan agar pembangunan yang direncanakan memiliki pondasi yang kuat dan terarah sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah pada dasarnya mengacu pada potensi sumberdaya yang ada, baik dari potensi sumberdaya manusia maupun potensi sumberdaya lahan, sebab pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan pemanfaatan yang optimal dari sumberdaya lahan yang tersedia.

Maka perlu penataan ruang yang sesuai dengan kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Karena keterbatasan ruang kewilayahan maka dalam pertumbuhan wilayah untuk bisa berkembang menjadi lebih maju, maka akan menyebabkan timbulnya perebutan dalam memanfaatkan ruang dan penggunaan tanah yang dianggap strategi sehubungan dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah yang bernilai atau menguntungkan secara ekonomis, atau terletak pada lokasi dan jalur perhubungan yang menguntungkan. dalam pelaksanaan undang-undang

dalam penataan ruang tidak saja dalam tahap perencanaan, tetapi juga diikuti dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kewilayahan yang sesuai dengan zona-zona pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata kelola ruang dan wilayah di setiap daerah masing-masing di Indonesia.

Disini penataan ruang di perlukan *law enforcement* undang-undang penataan ruang yaitu perlunya penyebaran dalam berbagai ketentuan operasional untuk menghindari konflik. Karena peraturan perundang-undangan lain juga belum tentu sinkron atau mudah disinkronkan bahkan bertentangan. Disamping adanya penafsiran yang berbeda dari peraturan yang sama, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian yang belum mantap disamping dari manusianya baik masyarakat maupun aparat pemerintah yang masih terbatas pengetahuannya dalam implementasi di lapangan (Didik Suhariyanto, 2009:1).

Tata ruang dan bangunan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu harus mampu dipertanggung jawabkan dengan baik dengan memperhatikan etika pembangunan (Akbar, Alam, & Rusli, 2012; Muliati, 2012; Rahardiansah, 2018).

Proses kebijakan tata ruang tersebut juga harus memperhatikan aspek perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Tujuan dari adanya tata kelola perkotaan adalah untuk menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, dimana dalam melakukan pengelolaan terhadap suatu kota harus terlebih dahulu mengetahui ide pembangunan perkotaan tersebut agar dapat melihat prospek kota berkelanjutan yang akan dibangun.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola perkotaan sendiri. Sehingga, dengan adanya undang-undang ini kota-kota di Indonesia diharapkan dapat menata wilayah perkotaan dengan sebaik-baiknya.



Wilayah Kota Bandar Lampung, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pada taraf peruntukan dan pemakaian yang telah ada selama ini, pemanfaatan Tata Ruang di Kota Bandar Lampung telah keluar dari jalur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

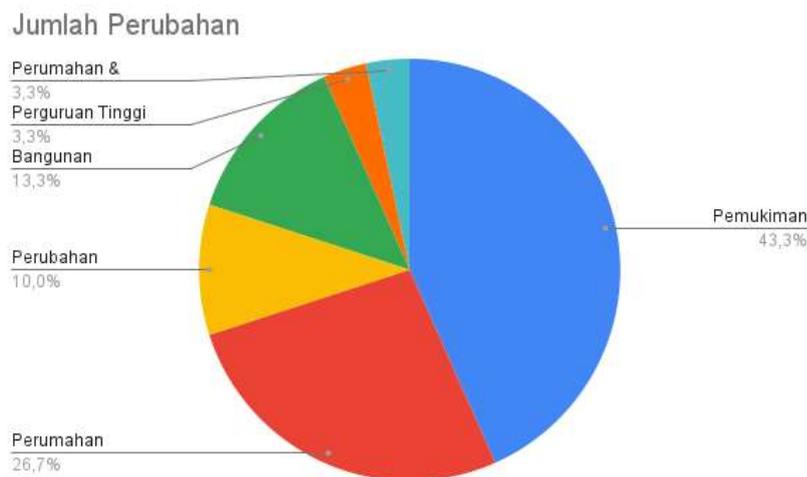
**Tabel 1. Total Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tahun 2020**

No.	Nama Objek	Luas (Ha)	%
1.	Garis Sempadan Pantai	250.07	1.34
2	Sempadan Sungai	241.03	1.29
3.	Hutan Lindung	443.75	2.37
4.	Kawasan Sepadan Rel	61.05	0.33
5.	Sempadan Mata Air	0.31	00
6.	Ruang Terbuka Hijau	344.26	1.84
7.	Wisata Alam	165.17	0.88
8.	Padang Lamun, Mangrove, Bakau	0.53	0.00
9.	Kebun Binatang	5.80	0.03
10.	Lahan Pertanian	278.40	1.49
11.	SUTET	5.60	0.03
12.	Median jalan dan Pedestrian	43.01	0.23
13.	Jalur Hijau	6.50	0.03
<b>Total Luas RTH</b>		1845.48	
<b>Luas Kota Bandar Lampung dalam RTRW</b>		18715.76	
<b>% RTH</b>		9.61	

*Sumber : WALHI Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan hasil kajian Fakta dan Analisis Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030, luas seluruh ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung pada tahun 2009 yang telah di Perdakan pada tahun 2011 seluas 2.185,59 Ha atau sekitar 11,08% dari total luas Kota Bandar Lampung dengan ruang terbuka hijau publik seluas 1.895,89 Ha atau sekitar 9,61% dari luas Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2016, hasil kajian Laporan Rencana Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung mengalami pengurangan dari luas Ruang Terbuka Hijau publik yaitu menjadi 533,86 Ha atau sekitar 2,70% dari total luas Kota Bandar Lampung. Sedangkan dengan luas wilayah Kota Bandar Lampung yang luasnya 19.722 Ha memerlukan luas ruang terbuka hijau publik seluas 3.944 Ha atau 20% dari luas kota, sehingga Kota Bandar Lampung masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau yang sangat luas yaitu 3.410,14 Ha atau 17,3% .



**Gambar 2. Perubahan Lahan RTH Kota Bandar Lampung**

*Sumber : WALHI Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan data pada gambar diatas kondisi Wilayah Resapan Air yang berada di Kota Bandar Lampung mengalami banyaknya perubahan atau penyalahgunaan dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Undang - Undang No. 26 tahun 2017 Pasal 17 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Penataan Ruang sebagai matra spasial pembangunan yang ada di wilayah perkotaan dan juga merupakan alat yang ditujukan untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan.

Dampak dari banyaknya penyalahgunaan lahan yang dialih fungsikan dari fungsi yang sebenarnya dikarenakan Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung yang belum Optimal sehingga mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap Lingkungan,dapat dilihat dari berbagai artikel – artikel berita yang membahas Tata Ruang Wilayah yang menyebabkan bencana banjir

Peneliti memunculkan dugaan bahwa terdapat tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, karna faktor konflik kepentingan antar sektor (Lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antar daerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan karena adanya alih fungsi penggunaan lahan yang belum sesuai dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung hingga mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti juga membandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti .Penelitian terdahulu merupakan refrensi bagi peneliti,penyajian penelitian terdahuku disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti/Tahun	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang di Kota Selogiri Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	Dian Safitri 2021 (Skripsi)	<p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang yang masih berlaku serta dapat mengetahui penyebab ketidaksesuaian penggunaan tanah yang terjadi dengan Rencana Tata Ruang Kota Selogiri.</p> <p>Hasil dari penelitian ini bahwa kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi eksisting sebesar 57,91% dan ketidaksesuaian yang terjadi sebesar 42,09%. Faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan kondisi eksisting adalah penyusunan rencana kurang memperhatikan potensi dan kebijakan yang ada sehingga kawasan terkesan dipaksakan untuk menjadi sebuah kota, Pemerintah Daerah kurang konsisten dalam mengendalikan tata ruang, kurangnya koordinasi antar instansi sektoral.</p>
2.	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan	Rani Nuraeni 2014 (Skripsi)	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan penggunaan lahan Kabupaten Bandung</p>

	<p>Arahan Penggunaan Lahan Wilayah di Kabupaten Bandung.</p>		<p>2002-2012, mengidentifikasi dan membandingkan pemanfaatan ruang saat ini dengan yang dialokasikan, mengkaji tingkat perkembangan wilayah, mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan penggunaan lahan dan menyusun arahan penggunaan lahan wilayah.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan luas ketidaksesuaian sebesar 54 ha. Alokasi penggunaan lahan menurut RTRW tidak sesuai dengan kondisi eksisting, seperti alokasi hutan dengan kondisi eksisting lahan terbangun, alokasi perkebunan dengan kondisi eksisting lahan terbangun, alokasi TPLB dengan kondisi eksisting TPLK, dan alokasi TPLK dengan kondisi eksisting lahan terbangun. Selain itu, terdapat penggunaan lahan transisi pada alokasi lahan terbangun dengan kondisi eksisting TPLK sebesar 7.906 yang terjadi karena lahan TPLK tersebut belum dimanfaatkan untuk menjadi lahan terbangun.</p>
3.	Evaluasi Kesesuaian	Lestari Juwita	Tujuan dari penelitian ini ialah untuk

	<p>Penggunaan Lahan Aktual dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo</p>	<p>Amanda 2015</p>	<p>mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan aktual tahun 2009 dan RTRW tahun 2010-2030 Kabupaten Probolinggo berdasarkan daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketidaksesuaian penggunaan lahan (N) pada kondisi aktual tahun 2009 seluas 22067.04 Ha dengan ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan hutan alam sebagai tegalan dan tingkat ketidaksesuaian penggunaan lahan (N) kondisi RTRW tahun seluas 41145.77 Ha dengan ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan tegalan sebagai perkebunan. Terdapat peningkatan penggunaan lahan yang tidak sesuai pada RTRW dibandingkan dengan penggunaan lahan aktual sebesar 19078.73 Ha atau 11.25% dari luas Kabupaten Probolinggo sehingga perlu dilakukan rencana tata ruang yang sesuai dengan kemampuan lahan.</p>
--	---	--------------------	---

**Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021**

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti lebih memfokuskan pada Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 dan Lahan Daerah Resapan Air / Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Bandar Lampung

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemkot Bandar Lampung terkait Kebijakan Tata Ruang Wilayah yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah :

Bagaimanakan Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan refrensi bagi kajian Ilmu Pemerintahan, Khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung.

## 2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi bagi pembaca terkait Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Tentang Evaluasi

Evaluasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “ *Evaluation* ” yang berarti sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan – acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Penilaian tersebut dapat bersifat netral, positif ataupun negatif atau merupakan suatu gabungan dari keduanya. Pada saat sesuatu di evaluasi, maka biasanya akan di ikuti dengan adanya pengambilan keputusan atas obyek yang sedang di evaluasi.

Evaluasi dapat juga di artikan sebagai suatu proses sistematis dalam memeriksa, menentukan, serta membuat suatu keputusan atau menyedia kan informasi terhadap program yang sudah dilakukan dan sejauh mana sebuah program telah tercapai. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan kesalahan yang ada di masa lalu, serta ditujukan untuk upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilannya suatu program. Dengan demikian misi dari evaluasi tersebut adalah untuk perbaikan atau penyempurnaan di masa yang mendatang atas suatu program. Evaluasi sangat berguna serta mempunyai banyak manfaat karena kita dapat mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian terhadap apa yang telah dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan.

Jadi, pengertian evaluasi secara umum adalah , suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai sejauh mana pencapaian dari suatu kegiatan atau objek , bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan suatu standar tertentu guna mengetahui apakah terdapat selisih di antara keduanya,serta bagaimana manfaat yang telah di kerjakan tersebut apabila di bandingkan dengan harapan – harapan yang ingin diperoleh. Dalam

pengertian yang lain, evaluasi merupakan suatu proses yang secara sistematis untuk menentukan atau membuat suatu keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Menurut Arikunto dan Cepi (2014:1) Evaluasi adalah *To Find Out, Decide The* Definisi tersebut menunjukkan bahwasannya kegiatan evaluasi tersebut harus dilakukan secara baik, bertanggung jawab, serta menggunakan metode ataupun strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang proses berjalannya suatu pekerjaan, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Menurut Anne Annastasi (1978:9), arti dari evaluasi ialah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas guna untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas.

Menurut Widyoko (2012:6) Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya

Menurut Cross (dalam Sukardi, 2015:1) mengatakan bahwa “ evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai.”, Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.

Dari semua pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan secara terencana guna untuk mengetahui sebuah keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen yang berkaitan dengan indikator, tujuan, dan manfaat objek evaluasi atau bahkan mengkomunikasikan

indromasi yang meyangkut tentang objek evaluasi dengan pemangku kepentingan. Objek di dalam penelitian yaitu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 dalam mengatasi masalah Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung yang belum mencapai 30% sesuai dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

### **2.1.1. Jenis –Jenis Evaluasi**

1. Evaluasi Formulasi yaitu evaluasi yang dapat dilakukan dengan mengkaji kembali formulasi apakah formulasi terkait dengan penyusunan kebijakan maupun kegiatan telah disusun dengan metode yang sesuai.
2. Evaluasi Proses ialah evaluasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Evaluasi Biaya adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui apakah biaya prioritas dalam rangka pencapaian tujuan telah ditetapkan.
4. Evaluasi Dampak merupakan suatu evaluasi yang dapat mengkaji terkait pengaruh dan kebermanfaatannya yang diberikan dari program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.

James P Lester dan Joseph Steward , Jr (2000) mengelompokkan evaluasi menjadi :

1. Evaluasi Proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi .
2. Evaluasi Impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil atau pengaruh implementasi kebijakan.
3. Evaluasi Kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan dengan tujuan yang dikehendaki.
4. Evaluasi Meta-Evaluasi, yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan – kesamaan tertentu.

### **2.1.2. Tujuan Evaluasi**

1. Untuk dapat mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap suatu kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk bisa mengetahui apa saja kesulitan yang telah dialami seseorang dalam suatu kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedia teaching.
3. Untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan suatu informasi penting bagi para pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.

### **2.1.3. Fungsi Evaluasi**

#### 1. Fungsi Selektif

Fungsi selektif ialah fungsi yang bisa menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya saja dapat menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lainnya.

#### 2. Fungsi Diagnosa

Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang di dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya saja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah.

#### 3. Fungsi Penempatan

Fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Contohnya saja untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan.

#### 4. Fungsi Pengukuran Keberhasilan

Dalam hal ini, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan.

#### **2.1.4. Tahap – Tahap Evaluasi**

##### 1. Apa Saja yang Dievaluasi

Hasil akhir suatu kegiatan atau program kerja selalu berkaitan dengan evaluasi. Oleh karena itu, sebelum evaluasi hendaknya memaparkan dengan jelas poin penting apa saja yang perlu dievaluasi.

##### 2. Merancang Kegiatan Evaluasi

Sebagaimana program kerja, ketika hendak melakukan kegiatan evaluasi baiknya ditentukan dulu rancangan kegiatan evaluasi. Hal ini akan mempermudah proses evaluasi. Selain menghindari pembicaraan *out of topic*, rancangan kegiatan evaluasi akan menciptakan pembahasan intens selama kegiatan evaluasi.

Hal-hal semacam desain evaluasi seperti apa yang akan dilaksanakan, agar data-data apa saja yang diperlukan, tahap-tahap kerja apa yang saya yang dilalui, dan siapa saja yang dilibatkan, serta apa saja yang dihasilkan harus jelas sebelum melaksanakan kegiatan evaluasi ini.

##### 3. Pengumpulan Data Evaluasi

Setelah rancangan kegiatan evaluasi ditentukan, selanjutnya adalah proses pengumpulan data yang diperlukan selama kegiatan evaluasi. Dengan proses pengumpulan data maka proses evaluasi akan berjalan lebih efisien dan efektif.

##### 4. Analisis Data dan Pengolahannya

Jika data yang diperlukan selama proses evaluasi telah dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah diterima.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dikelompokkan agar mudah dalam proses analisis sehingga menghasilkan hasil akhir sesuai fakta data. Hasil dari analisis data kemudian dibandingkan dengan harapan atau rencana awal kegiatan.

#### 5. Pelaporan Hasil Evaluasi

Sebagaimana proses akhir dalam suatu kegiatan, evaluasi berakhir dengan laporan hasil kegiatan evaluasi. Hal ini penting karena hasil akhir laporan akan digunakan sebagai dokumen oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, hasil evaluasi harus dikomentasikan secara tertulis agar bisa di manfaatkan sebagaimana mestinya.

## 2.2. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut William, N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2014), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pembagian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik; memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya

pada implementasi kebijakan (Nugroho, 2014). Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel berikut:

**Tabel 3. Kriteria Evaluasi menurut Dunn**

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap.
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Resonsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

*Sumber: Nugroho R. 2014. Public Policy.*

### 2.2.1. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Wibawa dalam Nugroho (2011:463), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini

evaluator dapat mengidentifikasi masalah ,kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut

#### **2.2.2. Tujuan dari Evaluasi Kebijakan**

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

### **2.2.3. Jenis Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Dunn membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian antara Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuandan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. lain :

Evaluasi Semu.

Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

Evaluasi Keputusan Teoritis.

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

#### **2.2.4. Dimensi Evaluasi Kebijakan**

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi dievaluasi dalam kebijakan publik. Dimensi tersebut adalah Evaluasi kinerja pencapaian tujuan Kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifitas dan efisiensi, dan lain sebagainya yang terkait. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat (*effect*) kebijakan, dampak (*outcome*) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dan lain-lain.

Menurut Palumbo dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus di dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, saat implementasi, hingga saat selesai diimplementasikan. Kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi antara lain:

Evaluasi Proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini menurut Palumbo diperlukan dua kali evaluasi, yakni :

- Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai apakah alternatif-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dengan manfaat (*cost-benefit analysis*), dll yang bersifat rasional dan terukur.
- Evaluasi Legitimasi kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat (*pooling*), *survery*, dll.
- Evaluasi Formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung Tujuan evaluasi formatif ini utamanya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan kondisi-kondisi apa yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi Formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi.
- Evaluasi Sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi Sumatif ini adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas kebijakan/program tersebut member dampak yang nyata pada problem yang ditangani.

## Evaluasi Formatif

### 1. Tujuan Evaluasi Formatif

Evaluasi Formatif adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Merupakan evaluasi terhadap proses.
- Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan

- Menggunakan model-model dalam implementasi
- Biasanya bersifat kuantitatif
- Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/program

Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk melihat :

- Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat.
- Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak;
- Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut (Rossi & Freeman dalam Parsons)

## 2. Jenis Evaluasi Formatif

Evaluasi administratif : Biasanya evaluasi administrative dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang dikaitkan dengan aspek-aspek ketaatan financial dan prosedur.

Evaluasi Yudisial : Evaluasi yang berkaitan dengan obyek-obyek hukum.

Evaluasi Politik : Evaluasi yg dilakukan oleh lembaga-lembaga politik.

## 3. Aspek-aspek Evaluasi Formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif ini adalah :

- *Effort Evaluation*: Mengevaluasi kecukupan input program.
- *Performance Evaluation*: Mengkaji output dibandingkan dengan input program.
- *Effectiveness Evaluation*: Mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.
- *Efficiency Evaluation*: Membandingkan biaya dengan output yang dicapai.

- *Process Evaluation*: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.

#### 4. Evaluasi Sumatif atau Evaluasi Dampak

##### A. Pengertian Dampak

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*).

Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak dan apakah akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

##### B. Tujuan Evaluasi Sumatif/Dampak

Evaluasi sumatif umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan efektifitas sebuah kebijakan/program terhadap permasalahan yang diintervensi. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.
- Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program
- Mengeksplorasi apakah ada akibat yang tidak diperkirakan baik yang positif maupun yang negatif
- Mengkaji bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran, dan apakah perbaikan kondisi kelompok sasaran betul-betul disebabkan oleh adanya program tersebut ataukah karena faktor lain.

### C. Dimensi Dampak

Dimensi dampak yang dikaji dalam evaluasi kebijakan ini meliputi:

- Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.
- Dampak pada kelompok di luar sasaran sering disebut eksternalitas / dampak melimpah (*spillover effects*).
- Dampak sekarang dan dampak yang akan datang.
- Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program dan dampak biaya tak langsung yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan (misalnya dampak terhadap pengeluaran rumah-tangga akibat relokasi pemukiman yang menyebabkan jarak ke sekolah/tempatkerja makin jauh,dan yang lainnya)

### D. Aprisial Dimensi Dampak

Menurut Langbein memperkirakan dampak perlu memperhitungkan dimensi-dimensi sebagai berikut:

#### 1. Waktu

Dimensi waktu ini penting diperhitungkan karena kebijakan dapat memberikan dampak yang panjang, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Semakin lama periode evaluasi waktu semakin sulit mengukur dampak, sebab :

- Hubungan kausalitas antara program dengan kebijakan semakin kabur,
- Pengaruh faktor-faktor lain yang harus dijelaskan juga semakin banyak
- Jika efek terhadap individu dipelajari terlalu lama maka akan kesulitan menjaga track record individu dalam waktu yang sama.
- Semakin terlambat sebuah evaluasi dilakukan akan semakin sulit mencari data dan menganalisis pengaruh program yang diamati.

## 2. Selisih antara dampak aktual dengan yang diharapkan.

Selain memperhatikan efektifitas pencapaian tujuan, seorang evaluator harus pula memperhatikan :

- Berbagai dampak yang tak diinginkan.
- Dampak yang hanya sebagian saja dari yang diharapkan dan
- Dampak yang bertentangan dari yang diharapkan.

## 3. Tingkat Agregasi Dampak

Dampak juga bersifat agregatif artinya bahwa dampak yang dirasakan secara individual akan dapat merembes pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan.

## 4. Tipe Dampak

Ada 4 tipe utama dampak program, yaitu :

- Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah dan sebagainya.
- Dampak pada proses pembuatan kebijakan: apa yg akan dilakukan pada kebijakan berikutnya.
- Dampak pada sikap publik : dukungan pada pemerintah, pada program dan sebagainya.
- Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

## E. Faktor-faktor Kegagalan Dampak

Sebuah kebijakan/program bisa saja gagal memperoleh dampak yang diharapkan meski proses implementasi berhasil mewujudkan output sebagaimana yang dituntut oleh program tersebut, namun ternyata gagal mencapai outcomenya; apalagi jika proses implementasi gagal mewujudkan keduanya. Hal ini menurut Anderson bisa saja disebabkan karena :

- Sumber daya yang tidak memadai.
- Cara implementasi yang tidak tepat (misalkan pilihan-pilihan tindakan yang kontra produktif seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat yang memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan).
- Masalah publik sering disebabkan banyak faktor tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor saja.
- Cara menanggapi kebijakan yang justru dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalkan karena takut dianggap melanggar prosedur, maka implementers bertindak sesuai 'textbook' walau situasinya mungkin berbeda).
- Tujuan-tujuan kebijakan tak sebanding bahkan bertentangan satu sama lain (misalnya kebijakan untuk menumbuhkan industry dalam negeri yang memberi insentif pajak dan kemudahan modal; tapi di sisi lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energy, dll).
- Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya (yang ini sering terjadi di Indonesia, terutama karena seringnya terjadi mark-up harga, ataupun karena bentuk-bentuk kegiatan yang terkesan dicari-cari untuk penyerapan anggaran yang seharusnya tidak dibutuhkan).
- Banyak masalah publik yang tak mungkin dapat diselesaikan.
- Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan.

#### F. Tahapan dan Kendala Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan

dengan tipe evaluasi lain. Edward A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

- Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- Analisis terhadap masalah.
- Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaannya sendiri, evaluasi tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau kendala. Hal ini disebabkan evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut. Anderson dalam Winarno mengidentifikasi enam masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan.

Pertama, ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan. Bila tujuan-tujuan dari suatu kebijakan tidak jelas atau tersebar, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah dicapai. Ketidakjelasan biasanya berangkat dari proses penetapan kebijakan. Kedua, kausalitas. Terdapat kesulitan dalam melakukan penentuan kausalitas antara tindakan-tindakan yang dilakukan terutama dalam masalah-masalah yang kompleks. Seringkali ditemukan suatu perubahan terjadi, tetapi tidak disebabkan suatu tindakan atau kebijakan.

### 2.3. Tinjauan Tentang Perencanaan

Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya.

Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan.

Lebih rinci lagi, mengadopsi definisi operasional perencanaan yang didefinisikan oleh Friedman dalam bukunya yang terkenal, *Planning in The Public Domain*, perencanaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan tahapan berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan yang akan diintervensi
- b. Memodelkan dan menganalisis situasi dan kondisi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan.
- c. Merancang satu atau lebih alternatif solusi yang potensial, baik dalam bentuk kebijakan, rencana substantif, rencana tindak, inovasi institusional, metode mobilitas sosial, dan lain-lain.

Alternatif- alternatif solusi ini biasanya mempunyai karakter sebagai berikut:

- a) Futuristik: spesifikasi tujuan dan sasaran, termasuk juga peramalan kondisi masa depan, penilaian probabilitas, skenario tahapan-tahapan kejadian yang akan terjadi, dan lain-lain
- b) Ruang: lokasi, struktur spasial, desain fisik, dan lain-lain
- c) *Resource requirements*: perkiraan biaya dan kebutuhan lainnya atas sumber daya langka, seperti foreign exchange, tenaga kerja ahli dan lain-lain
- d) Prosedur pengimplementasian alternatif solusi tersebut.
- e) Prosedur untuk menilai umpan balik (*feedback*) dan evaluasi.
- f) Mengevaluasi secara mendalam solusi alternatif yang ditawarkan, baik dalam hal kelayakan teknis, efektifitas biaya, dampak yang mungkin terjadi pada kelompok masyarakat, maupun tingkat penerimaan politik,

#### 2.4. Tinjauan Tentang Ruang

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Undang – Undang Penataan Ruang (UUPR), bahwa Ruang merupakan tempat yang meliputi ruang udara, ruang darat, dan ruang laut, termasuk ruang dimuka bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, mengerjakan kegiatan, dan menjaga kelangsungan hidupnya. Menurut para ahli pengertian ruang yaitu :

##### 1. D.A. Tisnaadmidjaja

Ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geometris dan geografi yang merupakan tempat bagi manusia dalam melakukan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.

##### 2. Jayadinata

Ruang ialah semua permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, wadah hidup tumbuh - tumbuhan, hewan dan manusia.

##### 3. Samadi

Ruang merupakan tempat bagi komponen-komponen lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses, yaitu saling mempengaruhi (interaksi), saling berhubungan (interelasi), dan saling ketergantungan (interdependensi).

##### 4. Newton

Ruang ialah suatu kuantitas yang mutlak ada tanpa melihat keberadaan ataupun distribusi materi alam semesta dan menurut UUPR Tata Ruang merupakan wajah struktur ruang dan pola ruang, Sedangkan Penataan Ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang.

#### **2.4.1. Proses Penataan Ruang**

Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah kota,. Konsep pengembangan wilayah kota telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah kota. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Ruslan Diwiryono (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep pola ruang dan struktur ruang sampai dalam era perkembangan terakhir, pada awal abad millennium serta mengarahkan konsep pengembangan wilayah kota sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.

Menurut Perpres No. 62 Tahun 2011 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruangdan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai

pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **2.5. Tinjauan tentang Tata Ruang**

Dewasa ini istilah tata ruang sering disebut dalam berbagai kesempatan dan oleh berbagai lapisan masyarakat mulai pejabat sampai masyarakat umum. Fenomena ini merupakan pertanda dimulainya era baru pemahaman dan pengakuan (legitimasi) tentang arti pentingnya tata ruang dalam bidang pembangunan. Hal itu tidak terlepas dari lahirnya UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang sebagai landasan hukumnya. Tata dapat diartikan sebagai aturan atau kaidah aturan dan susunan atau cara menyusun. Sedangkan ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan. Menurut pendapat Mabogonjue dalam Jayadinata dalam buku yang berjudul *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang Yang* ditulis oleh Rahardjo Adisasmita bahwa ruang terbagi kedalam 3 macam yaitu:

1. Ruang Mutlak, merupakan wadah bagi unsur-unsur yang ada di ruang itu, misalnya ruang permukaan bumi adalah wadah berbagai benua, gunung, kota dan sebagainya.
2. Ruang Relatif, jika tempat A dan B berdekatan tapi tidak ada jalan yang menghubungkan sedangkan tempat A dan C berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat perangkutan, maka dikatakan bahwa jarak AC menjadi lebih mudah dijangkau dan ruangnya relatif lebih kecil.
3. Ruang Relasi, yang melibatkan unsur-unsur yang mempunyai relasi satu sama lain dan saling berinteraksi, jadi ruang relasi mengandung unsur-unsur dan atau bagian-bagian yang saling berinteraksi, sehingga jika unsur-unsur berubah sebagai akibat interaksi ruang dikatakan bahwa ruang itu berubah.

Karena berbagai unsur terus mengadakan relasi dan interaksi maka dikatakan ruang relasi itu bersifat dinamis karena ruang itu terus berubah. Pengertian ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan, sehingga perencanaan pembangunan adalah perencanaan restrukturisasi ruang.

Lebih lanjut lagi Jayadinata mendefinisikan ruang berdasarkan aspek geografi umum dan geografi regional. Menurut aspek geografi umum, ruang (*space*) adalah permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia. Berdasarkan geografi regional, ruang yang merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta udara di atasnya. Ini dijelaskan dalam buku *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang Yang ditulis oleh Rahardjo Adisasmita Immanuel Kant dan Plato* dalam Eko Budihardjo memberi batasan tentang ruang secara filosofis yang mengartikan “Ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia” sedangkan Plato mengemukakan bahwa “Ruang adalah suatu kerangka atau wadah di mana objek dan kejadian tertentu berada”.

Batasan dan pengertian menurut UU No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah sebagai berikut: Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sama halnya pandangan menurut tokoh yang lain,

Menurut Sugandi dan Murtopo pun yang ditulis dalam buku *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang Yang ditulis oleh Rahardjo Adisasmita*, pengertian tata ruang dapat didefinisikan: Tata ruang (dengan penekanan

pada tata) adalah pengeturan susunan ruang suatu wilayah atau daeran sehingga tercapainya persyaratan yang bermanfaat bagi semi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat menguntungkan bagi perkembangan di wilayah atau daerah tersebut. Tata ruang (dengan penekanan ruang) adalah suatu wadah dalam tiga dimensi (trimatral), yakni tinggi, lebar, dan kedalamannya yang menyangkut bumi, air, sungai, danau, lautan, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, udara, ruang, angkasa di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan dan penggunaannya serta penggelolaannya mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan dan kesejahteraan rakyat.

## **2.6. Tinjauan Tentang Wilayah**

Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang diterapkan pada suatu wilayah. Pengertian pertama yang harus ditanamkan dalam mengidentifikasi wilayah adalah: “wilayah adalah ruang”. mengenai “ruang” ini ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan subjektif mengatakan penentuan wilayah sebagai cara membagi ruang untuk mencapai tujuan tertentu. Penentuan wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk menyusun pengelompokan ruang.

Wilayah dipandang sebagai suatu alat untuk menerangkan ruang yang didefinisikan menurut kriteria tertentu, dengan demikian apabila kriteria berubah, maka batas wilayahnya pun berubah. Definisi ini dikemukakan Glasson pada tahun 1978 dan ditulis kembali dalam buku yang ditulis oleh Siti Sutriah Nurzaman, yang berjudul Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia, Lebih dalam lagi Glasson mengungkapkan bahwa pandangan objektif berpendapat sebaliknya.

Jika menurut pandangan subjektif penentuan wilayah adalah cara untuk mencapai tujuan, maka menurut pandangan objektif tujuan dari penentuan wilayah adalah penentuan wilayah itu sendiri. Wilayah dipandang sebagai satu kesatuan yang pasti, suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan

dipetakan. Pada tahun 1905 Herbertson Glasson (ahli geografi dari Oxford) membagi dunia kedalam “wilayah alamiah” berdasarkan pendekatan analitis.

Pembagian ini berdasarkan empat kriteria, yaitu konfigurasi tanah, iklim, vegetasi, dan kepadatan penduduk. Dimana iklim merupakan faktor dominan. Konsep Pembangunan Wilayah Internal dimaksud adalah:

- a. Potensi sumber daya dan laut yang berlimpah yang merupakan peluang bagi pembangunan wilayah
- b. Kondisi alam suatu provinsi yang merupakan wilayah daratan yang berdataran tinggi, memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
- c. Adanya beberapa kawasan yang rawan bencana dapat menjadi kendala dalam pengembangan wilayah.
- d. Akses antar kabupaten masih bertumpu pada angkutan darat, dan pelayanan angkutan laut dan udara yang masih perlu ditingkatkan khususnya pada kabupaten yang memiliki wilayah kepulauan dan jarak tempuh yang panjang.
- e. Adanya kesenjangan ekonomi antar pusat pertumbuhan dengan daerah-daerah belakangnya dan kawasan-kawasan pulau-pulau kecil yang relatif masih terbelakang (khususnya yang masih sulit dijangkau).
- f. Fungsi utama kota-kota terutama sebagai simpul jasa distribusi pemasaran, perhubungan, perdagangan, pusat kegiatan industri dan pusat komunikasi.

## **2.7. Tinjauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang

wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

### **2.7.1. Tujuan Tata Ruang Wilayah**

Tujuan perencanaan tata ruang wilayah adalah mengurangi permasalahan dalam kinerja perencanaan tata ruang berdasarkan peluang yang dimiliki dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan tata ruang di masa depan. Sasaran penataan ruang wilayah

- a. Terwujudnya keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan tata ruang wilayah provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota, dengan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang sejalan dengan RTRW.

- b. Terwujudnya keselarasan antar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu Provinsi atau kabupaten/kota dengan RTRW provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan tersusunnya kesepakatan antara pemerintah suatu provinsi atau kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan.
- c. Terwujudnya sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan rencana sektoral dan wilayah, dengan memfungsikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi sebagai acuan perencanaan kegiatan sektoral dan wilayah.
- d. Terwujudnya RTRW provinsi atau kabupaten/kota sebagai pedoman penataan ruang dengan tersusunnya petunjuk operasional dengan rencana detail tata ruang.
- e. Terwujudnya peraturan perundangan penataan ruang di kabupaten/kota yang sesuai dan sejalan dengan RTRW provinsi berdasarkan hasil kesepakatan melalui evaluasi dan revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Terlaksananya RTRW provinsi, kabupaten/kota sesuai kaidah penataan ruang dengan peningkatan fungsi kelembagaan, peran serta masyarakat, dan ketersediaan data serta informasi penataan ruang.

## **2.8.Kerangka Pikir**

Perda Kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang tata ruang wilayah 30 menjelaskan tentang peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam penggunaan ruang.

Penggunaan lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan untuk daerah resapan air dan umumnya sebagai daerah untuk konservasi ruang hijau malah dijadikan fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, serta sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dipicu adanya sikap konsumtif dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan rasa ingin mendapatkan prestise dari orang lain. Selain itu, adanya dorongan dari pihak plain yaitu kepentingan industrial. Alih fungsi lahan tersebut dipicu oleh adanya pihak yang ingin membuat fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, serta sarana dan prasarana transportasi di tengah kota.

Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan antar sektor (Lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, konflik antar daerah, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penataan Ruang dimana dalam pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota sebesar 20% dari luas wilayah kota sedangkan untuk ruang terbuka hijau privat sebesar 10% dari luas wilayah kota .

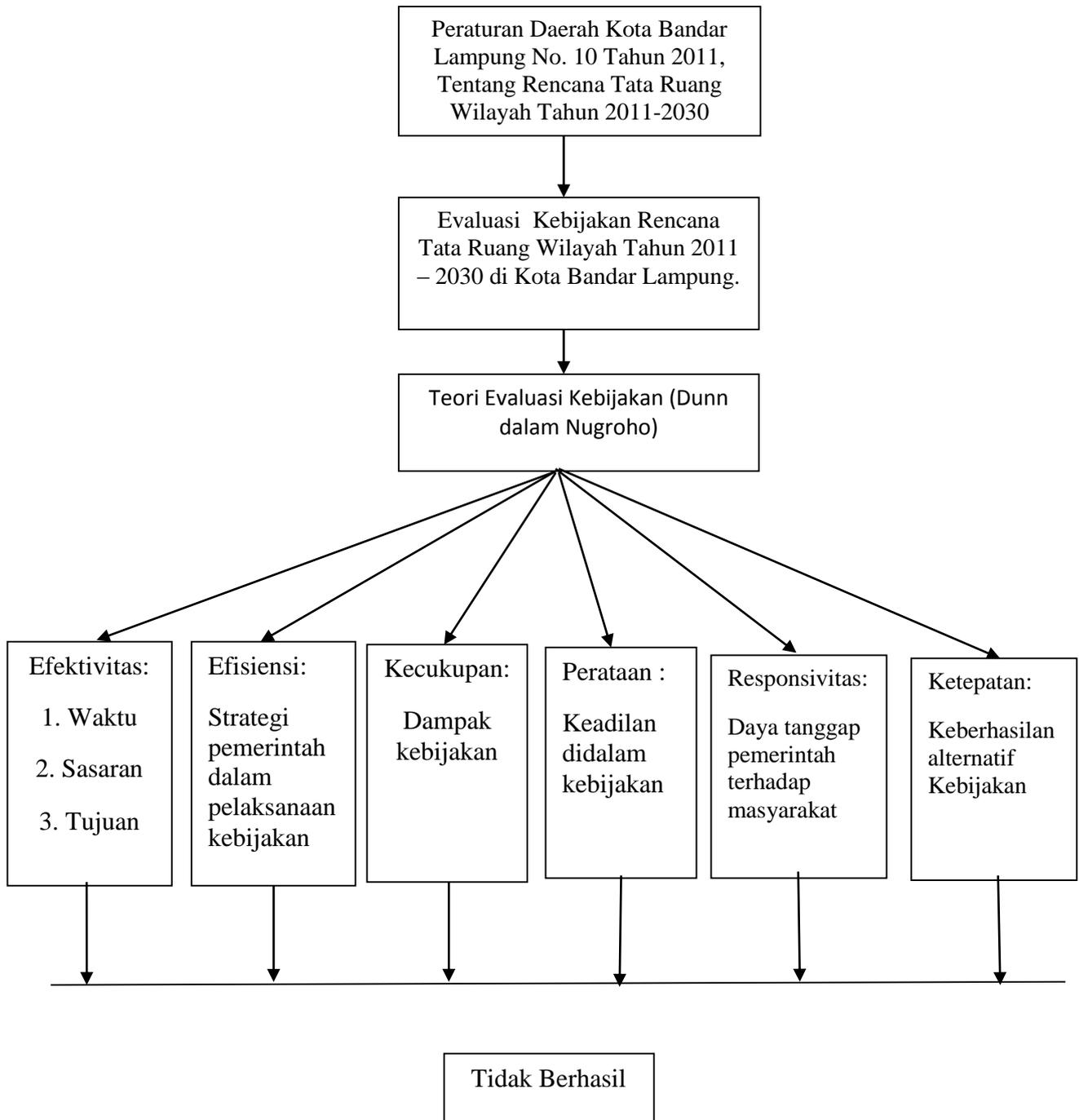
Menurut Dokumen Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kota Bandar Lampung saat ini adalah 1.895,89 hektar atau hanya 9,61% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung. Sehingga untuk memenuhi standar minimal penyediaan RTH publik perkotaan, Kota Bandar Lampung minimal harus mengupayakan penyediaan sebesar 10,39 % atau sekitar 2.049 hektar RTH publik.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung terkait cara penyelesaian permasalahan tersebut. Pada penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada Evaluasi/Proses Kebijakan, untuk mengetahui sejauh mana suatu Kebijakan atau Program tersebut bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan..

Di dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung . Berlandaskan teori tipe evaluasi menurut Dun dalam Nugroho ( 2011 : 729) yang terdiri dari :

1. Efektivitas : berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari waktu, sasaran, dan tercapainya kebijakan pemerintah.
2. Efisiensi : Strategi pemerintah untuk menghasilkan tingkat efektivitas kebijakan yang dikehendaki..
3. Kecukupan : Dampak dari kebijakan pemerintah.
4. Perataan : Keadilan Pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan.
5. Responsivitas : Daya tanggap pemerintah terhadap masyarakat.
6. Ketepatan : Keberhasilan alternatif kebijakan Pemerintah.

Oleh karena itu dapat dijelaskan dalam gambar kerangka pikir di bawah ini :



**Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir**  
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021).

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya akan mengilustrasikan atau menguraikan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara luas (Moelong, 2017).

Penelitian kualitatif adalah macam penelitian yang seluruhnya tidak didapat melalui langkah statistik atau bentuk hitungan lainnya. Walaupun datadatanya bisa dihitung dan disampaikan dalam angka-angka seperti sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif melihat pada analisis data non-matematis. Langkah ini menciptakan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan bermacam sarana antara lain wawancara, pengamatan, dokumen dan arsip, serta tes (Strauss dan Corbin, 2007)

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Dilakukan pada keadaan yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), tepat ke sumber data dan penulis adalah instrument pokok.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak memfokuskan terhadap angka.
3. Penelitian kualitatif membuat analisis data secara induktif.

4. Penelitian kualitatif lebih memusatkan data (data dibalik yang teramati).

### 3.2.Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Menurut Spradley (1980) mengatakan bahwa *A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*. Maksudnya yaitu fokus itu adalah domain tunggal atau sebagian domain yang berhubungan dengan lapangan. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus di proposal lebih berdasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang bisa didapat dari lapangan. Kebaruan informasi itu berupa upaya agar memahami secara mendalam tentang yang ada dilapangan, tetapi juga ada keinginan agar menciptakan hipotesis atau ilmu baru dari lapangan yang diteliti. Fokus yang sesungguhnya pada penelitian kualitatif didapat setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Berdasarkan penjelajahan umum ini peneliti bisa mendapatkan gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang lapangan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung , Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan meliputi Kebijakan/Proses.

1. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung. Berlandaskan teori tipe evaluasi menurut Dun dalam Nugroho ( 2011 : 729) yang terdiri dari :

1. Efektivitas : berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari waktu,sasaran,dan tercapainya kebijakan pemerintah.
2. Efisiensi : Strategi pemerintah untuk menghasilkan tingkat efektivitas kebijakan yang dikehendaki.
3. Kecukupan : Dampak dari kebijakan pemerintah.

4. Perataan : Keadilan Pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan.

5. Responsivitas : Daya tanggap Pemerintah terhadap masyarakat.

6. Ketepatan : Keberhasilan alternatif kebijakan Pemerintah.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono(2014:218) *purposive* merupakan lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini Alasan Peneliti memilih lokasi di Kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian adalah karena terjangkaunya lokasi penelitian oleh peneliti serta berdasarkan pada adanya Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Bandar Lampung. Penelitian berlokasi di Dinas Perumahan Dan Permukiman Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan, BAPPEDA Kota Bandar Lampung, LSM Wahana Lingkunga Hidup Indonesia (WALHI) Bandar Lampung.

### 3.4. Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, Arikunto, (1998:107) mengklasifikasikannya menjadi 3 yaitu: *Person* (sumber data berupa orang), *Place* (sumber data berupa tempat), *Paper* (sumber data berupa symbol). Sedangkan menurut Lonfland (dalam Moleong, 2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan Tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data

tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio, pengambilan foto atau film.

### 1 Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, yang telah ditentukan terkait tentang Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dapat dari sumber bacaan, dokumen-dokumen serta berbagai sumber lainnya. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperoleh penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Adapun Menurut Hasan (2002:58) data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain-lain.

## 3.5 Informan

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2012:54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa saja yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti.

Informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi, keterangan, pemaparan tentang situasi atau keadaan yang akan diteliti.

Alasan penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011 – 2030 di Kota Bandar Lampung , sejauh mana Kebijakan Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya dengan Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 4. Data Informan**

No	Informan	Alasan Memilih
1	Kepala Bidang Pemetaan (Dinas Perumahan dan Permukiman)	Bertugas dalam membuat perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pemetaan lingkungan termasuk tata ruang wilayah kota
2	Kepala Bagian Tata Lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup)	Bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang inventarisasi sumber daya alam, menyusun RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup..
3	Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang BAPPEDA Kota Bandar Lampung	Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengurus terkait perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan tata ruang.
4.	LSM WALHI	Sebagai lembaga pengamat lingkungan

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2021*

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisa. Jenis data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang merupakan pencetus kebijakan dan pengguna atau fasilitator kebijakan tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA Kota Bandar Lampung dan data-data pendukung lainnya yang didapatkan melalui bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yaitu dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner (Raco, 2010:116). Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pemikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini dengan cara menggali informasi secara mendalam dan mengajukan pertanyaan atau percakapan secara langsung dengan teknik kunci berdasarkan panduan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi.

#### **2. Observasi**

Menurut Sugiyono, (2018:145) observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang Nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014:46). Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa oberservasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Penulis mengumpulkan data dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian daerah. Pemeintahan daerah melakukan kebijakan inovasi. . Peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang real bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian ke lokasi penelitan

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2014:267) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, obersevasi dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Pada penelitian ini, triagulasi yang digunakan yaitu triagulasi sumber dengan cara menguji data dengan informasi menggunakan pencarian data yang sama antara informan satu dengan lainnya, maupun melalui sumber lain seperti berita, media maupun jurnal. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan

menggunakan cara perbandingan data antara data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh dari dokumentasi. Membandingkan data informan satu dengan lainnya juga merupakan pengujian kebenaran data yang sebelumnya.

### **3.8 Teknik Pengolahan Data**

Tahap selanjutnya ialah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (dalam Singarimbun, 2008:240) terdiri dari:

#### **1. Editing**

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya, dalam proses ini peneliti mengolah hasil data wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlakukan untuk penulisan. Editing data adalah sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap.

Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai. Data yang dilakukan dalam proses editing ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang masih belum memenuhi kaidah penulisan ilmiah serta kalimat yang belum baku sesuai EYD atau masih bersifat mentah.

## 2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono, (2014:246) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam menganalisis data yang didapat dari lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (2007) yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Menurut Sugiyono (2014:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal-hal penting pada temuan di lapangan untuk melihat manajemen melalui pihak-pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi untuk mencapai tujuan peneliti inginkan.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan, sehingga semua informasi yang disampaikan mempunyai makna dan arti.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah tahap terakhir dalam menganalisis data. Data yang diuji keabsahannya melalui validasi internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dilakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian diperoleh data yang  $v\epsilon$  dan jelas. Penarikan kesimpulan juga dilakukan untuk memberikan deskripsi singkat dari banyak informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung**

#### **1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung**

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibu Kota Propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas 197,22 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
- e. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

## 1. Topografi

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m. Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan Pulau dibagian Selatan
- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian Utara
- c. Wilayah perbukitan terdapat disekitar Teluk Betung bagian utara, barat dan timur
- d. Dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian barat yaitu wilayah Gunung Betung dan Gunung dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian timur

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian maksimum 700 mdpl, ketinggian 2 kecamatan tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing 2-5 mdpl. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40%, wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0% diantaranya berada di

wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton.

Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40% diantaranya adalah Kecamatan Panjng, Teluk Betiung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

## 2. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 902.885 jiwa (berdasarkan data tahun 2012), kepadatan penduduk sekitar 4.578 jiwa/km<sup>2</sup> dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dari tahun ke tahun :

**Tabel 5. Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung**

Tahun	2000	2010	2011	2013	2014	2030
Jumlah penduduk	743.109	881.801	922.808	1.167.101	1.251.642	2.400.00 ( <i>perkiraan</i> )

( Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

## B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung

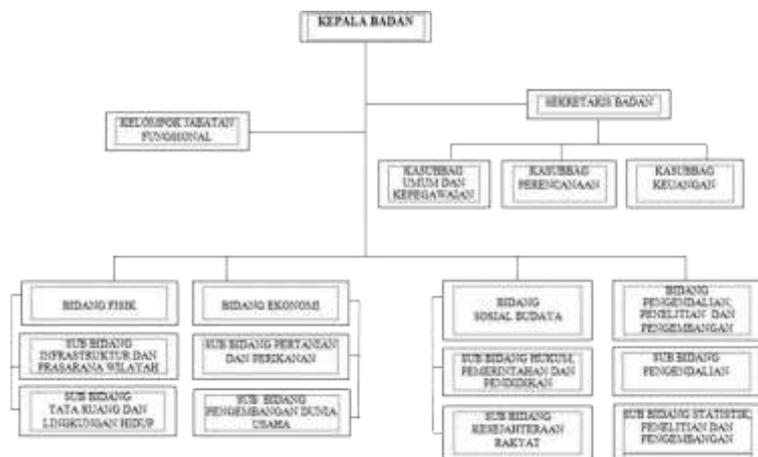
### 1. Profil Bappeda Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya Bappeda kota mengintegrasikan perencanaan pembangunan kota dengan fungsi utama Bappeda adalah : a. Perumusan kebijakan, b. Bimbingan konsultasi dan koordinasi, c. Pemantauan dan evaluasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, telah diatur dalam Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dengan struktur :

- a. Kepala Bappeda
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
  - 1) Sub bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi
  - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang statistik dan penelitian terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
  - 1) Sub bidang statistik dan pelaporan
  - 2) Sub bidang penelitian dan pengembangan
- d. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
  - 1) Sub bidang produksi dan keuangan
  - 2) Sub bidang pengembangan dunia usaha
- e. Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 2 Sub yaitu:
  - 1) Sub bidang pemerintahan dan sumberdaya manusia
  - 2) Sub bidang kesejahteraan rakyat
- f. Bidang fisik dan prasarana terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang
  - 1) Sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup
  - 2) Sub bidang sarana dan prasarana
- g. Unit Pelaksanaan Teknis  
Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis pada Bappeda Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- h. Kelompok Jabatan Fungsional  
Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan**



**Daerah Kota Bandar Lampung**

**Sumber : Renstra BAPPEDA Kota Bandar Lampung**

### A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda Kota Bandar Lampung diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Bappeda Kota Bandar Lampung. Bappeda sebagai lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Rincian tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Perda dimaksud, adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakn daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **2. Fungsi**

1. Perumusan kebijakn teknis bdidang perencanaan daerah
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Visi Dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)**

### **Visi**

#### **Aman**

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertibab masyarakat baik dari gangguan manusia maupun gangguan alam, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertibab dalam masyarakat, meningkatkan penegakan supremasi hukum serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang

#### **Nyaman**

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatkan kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai visi kota yang nyaman, misi yang hendak diemban oleh Kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, seusia serta terjangkau

oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang memadai bagi warga kota dan pendatang.

### **Sejahtera**

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

### **Maju**

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat menagkap dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan dalam perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional. Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usah maupun aktifitas domestik. Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditunjukkan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia dan regional, sert berfungsi sebagai basis perkembangan Kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga Kota Bandar Lampung.

## **Modern**

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing berbasis perkotaan. Dalam konteks modern ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintah maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian Kota Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembnagkan sektor perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotan.

## **Misi**

- 1) Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan iptek dan nilai-nilai ketaqwaan, perkembangan kreatifitas seni dan budaya serta peningkatan prestasi olahraga
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
- 4) Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, berorientasi kewirausahaan dan bertata kelola yang baik
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan penataan

- 6) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dengan mengedepankan penataan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana kota wisata yang maju dan modern

### **C. Gambaran Umum LSM WALHI**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 498 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunahan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Berdirinya walhi lampung sejak 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 15 Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan organisasi publik yang mandiri dan tidak berorientasi laba. WALHI Lampung membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisasi maupun individu. WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan lingkungan hidup. Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan keikutsertaan kelompok pencinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup antar-LSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada tahun 1987, Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala, dan Putra Rimba ( Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH UNSRI di Palembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin kelompok pencinta alam lampung yang di pelopori oleh

Watala, Wanacala, Putra Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di Provinsi Lampung.

Walhi Lampung ini pun mengesahkan beberapa anggota forum dari kalangan LSM dan Pencinta Alam pertambahan anggota forum menjadikan jumlah anggota forum menjadi 10 yaitu : Watala, Wanacala, PKBI, Putra Rimba, Mitra Bentala, Yasadhana, Mapala Unila, Masapala AKL, Matala UTB dan Mainaka. Pada waktu PDLH I Korda Walhi Lampung ini berganti menjadi Badan Eksekutif Daerah Walhi Lampung yang di pimpin oleh direktur Eksekutif yaitu Guswarman (mitra Bentala), Dewan Daerah Dedi Mawardi (LBH Bandarlampung), Heri (Yasadhana), Gunawan ZL (Wanacala). Kegiatan advokasi pada waktu itu adalah penolakan pembuatan pembangkit Listrik Tenaga Air batutege, karena secara ekologi merusak tatanan penyimpanan air dengan mengorbankan bukit-bukit yang ada di sekitarnya.

### **Visi**

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

### **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- 2) Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi

## **D. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung**

Dinas Perumahan dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

### **A. Tugas Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung**

Dinas Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang perumahan, pemukiman, tata ruang dan pertanahan

### **B. Fungsi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Pemukiman terdiri dari;

- 1) Kepala Dinas

- 2) Sekretariat
- 3) Sub bagian Program dan Keuangan
- 4) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- 5) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan:
  1. Seksi Arsitektur
  2. Seksi Perumahan
  3. Seksi Tata Bangunan
- (6) Bidang Pengendalian Pemukiman:
  1. Seksi Pengawasan
  2. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum
  3. Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengadilan
- (7) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
  1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
  2. Seksi Pemanfaatan Ruang
  3. Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang
- (8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (9) Kelompok Jabatan Fungsi

## **D. Visi Dan Misi**

### **a. Visi**

Terwujudnya penataan kota dengan estetika sesuai rencana kota dan pemberian pelayanan publik yang baik.

### **b. Misi**

- 1) Melakukan tertib tata ruang, tertib bangunan yang berestetika perkotaan melalui kebijaksanaan kota yang berwawasan lingkungan berkelanjutan
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Tata Kota Bandar Lampung

- 3) Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan peruntukannya
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Tata Kota Bandar Lampung

## VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat peneliti tarik adalah sebagai yaitu evaluasi kebijakan RTRW tahun 2011-2030 secara keseluruhan adalah tidak berhasil karena faktor anggaran dan juga kurang maksimal dan optimalnya kinerja pemerintah kota dalam pelaksanaan kebijakan RTRW tahun 2011-2030.

1. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan teori evaluasi Dunn, ditarik kesimpulan :

A. Pada indikator efektivitas, yang dinilai dari waktu, sasaran dan tujuan. Pada segi waktu dinilai kurang efektif karena pemerintah kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan masih terhambatnya anggaran yang diberikan untuk pembangunan RTH di Kota Bandar Lampung. Sedangkan pada segi sasaran sudah tepat atau sudah efektif meskipun belum maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya dan dari segi tujuan cukup jelas dan dinilai cukup efektif walaupun dalam pelaksanaannya pemkot belum maksimal dan optimal sehingga tujuannya masih belum sepenuhnya tercapai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan RTRW tahun 2011-2030 di Kota Bandar Lampung belum efektif. Target RTH Kota Bandar Lampung yang seharusnya 10% untuk public tetapi hanya terealisasi sebanyak 5,68%.

- B. Pada indikator efisiensi yang dinilai dari Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup efektif, karena dari masing-masing lembaga terkait telah menyiapkan usaha atau startegi dalam memenuhi kebijakan RTRW tahun 2011-2030 di Kota Bandar Lampung demi mencapai hasil yang baik dan diinginkan
- C. Pada indikator kecukupan yakni menilai dari dampak suatu kebijakan dapat disimpulkan bahwa kebijakan RTRW tahun 2011-2030 di Kota Bandar Lampung cukup baik walaupun ada masalah yang belum dapat terselesaikan dengan baik yaitu RTH publik yang belum tercapai sebanyak 20%, berdampak bagi ekosistem lingkungan dan masalah perizinan yang dinilai masih sembarangan.
- D. Pada indikator pemerataan menilai dari keadilan didalam kebijakan tersebut dan dapat disimpulkan perataan dalam kebijakan RTRW tahun 2011-2030 yaitu belum merata karena pada kenyataannya berdasarkan RTRW 2011-2030 RTH dialokasi oleh pemkot seluas 11,08% yang mana idealnya bahwa didalam UUD no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang untuk RTH itu sendiri memang harus diwajibkan 30%. 20% untuk publik dan 10% untuk privat.
- E. Pada indikator responsivitas yang dinilai dari daya tanggap pemerintah terhadap masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa resposivitas pemerintah terhadap masyarakat belum baik karena pembentukan RTRW yang cenderung terburu-buru dan melupakan aspek ekologis dan keselamatan warga Kota Bandar Lampung, khususnya untuk keselamatan lingkungan karena kita lihat semakin hari semakin banyak banjir dan pemkot tidak serius.
- F. Indikator ketepatan yaitu dinilai dari kebijakan alternatif yang dilakukan untuk membuat kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang baik dan maksimal dan ditarik kesimpulan bahwa cukup tepat karena akan diadakan program pengelolaan ruang terbuka hijau walaupun tetap harus ada pengawasan dari beberapa bukit di Kota

Bandar Lampung. Banyak bukit-bukit di Kota Bandar Lampung ini banyak yang ahli fungsi lahan.

## **6.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan Evaluasi Kebijakan RTRW tahun 2011-2030 di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemkot yang terkait harus benar-benar berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan permasalahan belum tercapainya 20% RTH publik Kota Bandar Lampung
2. Kedepannya Pemkot Kota Bandar Lampung harus memperhatikan segala aspek kebijakan tentang RTH Kota Bandar Lampung
3. Pemkot harus mengoptimalkan kinerja dalam kebijakan RTRW dalam menangani kurang maksimalnya RTH di Kota Bandar Lampung
4. Pemkot harus melakukan pengawasan terhadap beberapa bukit yang menjadi wilayah alih fungsi lahan di Kota Bandar Lampung
5. Pemkot harus lebih serius dalam menanggapi dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan ekosistem lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

Adisasmita, Rahardjo. cet. Ke-2, 2013 *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*,  
Yogyakarta, Graha Ilmu.

Albert Rumokoy, Donald, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-1.  
Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014

Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*:  
Pustaka Belajar. : Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.: PT.  
Rineka Cipta. : Jakarta.

Arjuna,Wiwaha. 2013. Tinjauan Pustaka *Ruang Terbuka Hijau*.  
[www.blogspot.com](http://www.blogspot.com). Diakses 29 April 2014

Bogdan, Biklen, 1982 *Pengantar studi Penelitian*, PT ALFABETA, Bandung

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.  
Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

Hidayati,Nurul. 2015. *Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam  
Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Bibit Bratang*. Jurnal Review Politik.  
Vol 05 (1):3-5

H.Wijayanto., R.K.Hidayati. 2017. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau  
di Kawasan Perkotaan.(Studi Pengembangan Administrasi di Kota Jakarta  
Utara)*. Jurnal Spirit Publik Vol 12 (2): 62-64

- Johara T. Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung. Penerbit ITB.
- L.D.Cahya., L.F.Widyawati., F.W.Ayodhia. 2016. *Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi*. Jurnal Planesa. Vol 7 (1): 1-2
- Lestari Juwita Amanda. 2015. *Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Probolinggo*. Jurnal sumberdaya alam dan lingkungan. Vol. 2 (2)
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr.Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2006
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta.
- Maulana.Irvan. 2009. Analisis dampak konversi lahan pertanian terhadap produksi padi dan land rent (Kasus Perumahan Pakuan Regency) Kota Bogor). Skripsi.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta : UI Press.
- Mugi Taufik, 2011 *Penataan Koridor Jalan Jenderal Sudirman Perkotaan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Dilihat Dari Elemen Ranc Kota*. Infomatek, 13 (2).
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, : PT. Remaja Rosdakarya Offset : Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sitorus, S.R.P. 2004. *Evaluasi Sumberdaya Lahan*. Bandung: PT Tarsito Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwono,Sudarwaman. 2013. *Kontruksi Tata Ruang Air dalam Tema Arsitektur Eskplorasi Integratif Disiplin Ilmu Sipil Keairan dan Arsitektur Kota Bekasi*. Skrispi.
- Utomo,Dkk. 1992. *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*. Universitas Lampung. Jurnal Agro Ekonomi, Vol 25. No. 2
- Wahyunto, dkk,. 2001. *Studi Perubahan Lahan di Sub DAS Citarik, Jawa Barat dan DAS Kaligarang Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah*. Hal 39- 40. Bogor 1 Mei 2001.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. : Pustaka Pelajar :Yogyakarta
- Winarno,budi,2002 *kebijakan Publik,teori dan proses*. Media Presindo Yogyakarta:

### **Jurnal**

- Suminar, Ratna. 2015. *Koordinasi Antar Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau*. Universitas Lampung. Bandar Lampung

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Bandar Lampung

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman  
Penyediaan Dan Pemanfaatan Rth Di Kawasan Perkotaan

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung  
Tahun 2005-2025

**Dokumen Lainnya**

Kerta Posisi RTRW Bandar Lampung

Dokumen KLHS RTRW